



<https://doi.org/10.56552/jisipol.v8i1.388>

Modalitas Elite Lokal Dan Restrukturisasi Koalisi: Studi Longitudinal Dinamika Pilkada Jeneponto 2013–2024

¹⁾Isman Triyadi Iskan, ²⁾ Andrew Kresna Ekaputra

^{1),2)}Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin

Corresponding Author: ismantryadi@gmail.com

Abstract

This study analyzes the influence of local elite modalities, economic, social, cultural, and symbolic, in the formation and restructuring of coalitions in Jeneponto Regional Elections through a longitudinal perspective spanning 2013–2024. Using a qualitative case study approach with secondary data analysis, the research traces the evolution of coalition mechanisms from the 2013 Regional Election (dominant symbolic capital, 51.04%) to 2018 (complete modal integration, 42.98% vote share but 52.4% electability) and contextualizes these findings with contemporary dynamics. While prior studies have separately examined pragmatic coalitions, political dynasties, and Bourdieu's capital in Indonesian local politics, they have rarely traced how the configuration of elite modalities transforms within a single locality across multiple electoral cycles. Addressing this gap, the study's novelty lies in constructing a longitudinal analytical framework that integrates Unified Elite Theory and New Elite Theory with Bourdieu's concept of modalities to explain coalition restructuring in a patrimonial context. Historical findings reveal the fragmentation of the Iksan–Mulyadi coalition and substitution with Paris Yasir as an optimization of modal combination, while contextualization with recent literature shows this pattern remains relevant in the 2024 elections, where political dynasties increasingly rely on material- and network-based mechanisms. Methodologically, the framework links historical findings to contemporary issues of oligarchy and political dynasties, illuminating long-term trajectories of local coalition transformation. Practically, the research provides insights into coalition restructuring mechanisms and elite modal shifts useful for anticipating future regional election dynamics and designing more equitable electoral reforms.

Keywords: Elite Modalities; Political Coalitions; Local Elections; Patrimonialism; Coalition restructuring

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh modalitas elite lokal, ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik, dalam pembentukan dan restrukturisasi koalisi pada Pilkada Jeneponto dengan perspektif longitudinal 2013–2024. Melalui pendekatan studi kasus kualitatif dengan analisis data sekunder, penelitian melacak evolusi mekanisme koalisi dari Pilkada 2013 (modal simbolik dominan, 51,04%) hingga 2018 (kombinasi modal lengkap, 42,98% namun elektabilitas 52,4%) dan mengontekstualisasikannya dengan dinamika



kontemporer. Studi terdahulu telah membahas koalisi pragmatis, dinasti politik, dan kapital Bourdieu secara terpisah, namun jarang melacak bagaimana konfigurasi modalitas elite bertransformasi dalam satu wilayah lintas beberapa siklus elektoral. Menjawab kesenjangan tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka analitik longitudinal yang mengintegrasikan Unified Elite Theory dan New Elite Theory dengan konsep modalitas Bourdieu untuk menjelaskan restrukturisasi koalisi dalam konteks patrimonial. Temuan historikal menunjukkan perpecahan koalisi Iksan–Mulyadi dan substitusi dengan Paris Yasir sebagai optimalisasi kombinasi modalitas, sedangkan kontekstualisasi dengan literatur terkini mengungkapkan pola ini masih relevan dengan Pilkada 2024, di mana dinasti politik semakin mengandalkan mekanisme berbasis modal material dan jaringan. Secara metodologis, kerangka ini menghubungkan temuan historis dengan isu kontemporer oligarki dan dinasti politik, sehingga menerangi trajektori jangka panjang transformasi koalisi lokal. Secara praktis, penelitian memberikan wawasan tentang mekanisme restrukturisasi koalisi dan perubahan modalitas elite yang berguna untuk mengantisipasi dinamika Pilkada masa depan dan merancang reformasi elektoral yang lebih adil.

Kata Kunci: Modalitas Elite; Koalisi Politik; Pilkada Lokal; Patrimonialisme; Restrukturisasi Koalisi

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia telah mengalami perubahan besar sejak pemilihan langsung dimulai pada tahun 2005. Awalnya, Pilkada dirancang untuk lebih fokus pada ideologi dan kebijakan, namun kini telah berkembang menjadi arena kompetisi yang lebih kompleks dan pragmatis. Salah satu perubahan terbesar terlihat dalam cara elite lokal membentuk koalisi. Alih-alih mengutamakan kesamaan ideologi atau kebijakan, koalisi saat ini lebih banyak dibentuk berdasarkan pertimbangan praktis, seperti perhitungan elektoral, akses terhadap kekuasaan, dan posisi strategis dalam struktur elite lokal (Ekowati, 2019; Al Hamid, 2025). Ekowati (2019) menunjukkan bahwa partai politik lebih sering menggunakan cara pragmatis dalam membentuk koalisi dan memilih pasangan calon karena fokusnya bergeser kepada kemenangan dan perolehan kekuasaan, bukan lagi pada ideologi. Kondisi ini menciptakan jarak antara teori koalisi politik yang sudah ada, seperti teori koalisi kemenangan minimal (Minimal Winning Coalition/MWC) yang dikemukakan Riker (1962), dengan kenyataan di lapangan, di mana pembentukan koalisi lebih dipengaruhi oleh logika pragmatis dan pertimbangan modalitas elite (Hidayat et al., 2026).

Studi terbaru semakin menguatkan keberlanjutan fenomena ini. Al Hamid (2025) dalam analisisnya tentang perkembangan koalisi politik Indonesia 2014–2024 menemukan bahwa koalisi di Indonesia sering kali bersifat ekspansif, lebih berfungsi untuk meredam ketidakstabilan politik daripada untuk meningkatkan efisiensi. Hasil ini sejalan dengan riset Election Corner Fisipol UGM (2025) yang memetakan bahwa lebih dari 75% dari 545 daerah pada Pilkada 2024 memiliki pemenang yang dapat diprediksi sejak awal akibat dominasi koalisi besar, gabungan minimally winning coalition dan



surplus majority coalition, sehingga mengindikasikan gejala uncontested election. Prianto dan Yusrini (2024) menemukan bahwa pragmatisme partai politik dan fenomena calon tunggal telah membuat Pilkada di berbagai daerah menjadi kurang kompetitif, sementara Sapdiani dan Pratama (2025) menegaskan bahwa kemunculan kolom kosong di Pilkada 2024 merupakan ekspresi pragmatisme partai yang lebih memilih bergabung dalam koalisi besar untuk mengusung petahana berkapasitas elektabilitas tinggi. Fenomena serupa ditemukan Hidayat et al. (2026) dalam studi pembentukan Koalisi Banten Maju pada Pilgub 2024: koalisi lebih dipengaruhi faktor pragmatis, kepentingan kekuasaan dan akses terhadap sumber daya, daripada kesamaan ideologi. Secara mendasar, koalisi dalam Pilkada lebih berfungsi sebagai alat untuk melindungi oligarki politik agar tetap memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya negara, bukan sebagai persatuan berdasarkan nilai atau tujuan bersama (Hopkin, 2003; Sari et al., 2025).

Fenomena koalisi pragmatis ini sangat terkait dengan kekuatan oligarki dan dinasti politik yang semakin berkembang dalam Pilkada Indonesia. Indonesia Corruption Watch (2024) mengungkapkan bahwa 26,6% atau 155 dari 582 kandidat dalam Pilkada 2024 terindikasi terkait dinasti politik. Temuan ini dikuatkan riset Institute for Public Policy (IPP) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (2024) yang mencatat lonjakan hingga 605 figur politisi dinasti yang bertarung di berbagai level pemilihan pada 2024. Kenawas (2023), dalam *Asian Journal of Comparative Politics*, menyajikan kesimpulan empiris orisinal bahwa praktik dinasti politik di Indonesia meningkat lebih dari tiga kali lipat hanya dalam satu siklus pemilu, yakni antara 2010 hingga 2018. Lebih lanjut, Telaumbanua (2024) menemukan bahwa dinasti politik berdampak besar, seperti menurunnya partisipasi politik masyarakat, berkurangnya pluralisme, dan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan, karena lembaga negara cenderung diprivatisasi demi kepentingan kelompok kecil. Adyan et al. (2025), dengan teori Bourdieu, menjelaskan bahwa modal budaya dan modal ekonomi berperan penting dalam keberlanjutan praktik dinasti, di mana sekelompok kecil elite yang terus mendominasi membentuk “kelas politik” yang memegang kekuasaan dan memperkuat modal simbolik mereka.

Untuk memahami mekanisme fenomena kontemporer ini, diperlukan kerangka analitik yang mampu menangkap kompleksitas dinamika elite lokal. *Unified Elite Theory* (UET) yang dikembangkan Higley dan Burton (2006) menawarkan perspektif berharga tentang bagaimana stabilitas rezim bergantung pada konsensus nilai dan integrasi struktural di antara elite. Namun, UET memiliki keterbatasan dalam konteks lokal



Indonesia di mana elite jarang membangun konsensus nilai yang kokoh. *New Elite Theory* (NET) yang dikembangkan Pakulski (2012) menyediakan perspektif komplementer dengan mengakui bahwa elite modern tidak lagi homogen atau terkonsolidasi, melainkan terfragmentasi dalam berbagai hierarki status yang dibentuk oleh kombinasi modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik (Pakulski & Waters, 1996). Haboddin (2020) dalam studinya tentang sirkulasi elite lokal di Bantaeng menemukan bahwa keberhasilan elite dapat dimaknai sebagai jatuhnya elite lama dan bangkitnya elite politik baru, menunjukkan dinamika fragmentasi yang konsisten dengan prediksi NET.

Konsep modalitas dari Pierre Bourdieu (1986) menjadi kerangka analitik kunci untuk memahami dinamika elite dalam Pilkada lokal. Miranti & Suryani (2023) menegaskan bahwa modal politik, ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik sangat diperlukan kandidat untuk memperoleh kemenangan di arena politik. Kamal et al. (2026), dalam studi kemenangan Andi Sumangerukka pada Pilkada Sulawesi Tenggara 2024, memperlihatkan bahwa modal politik dapat dikonversi secara strategis untuk memenangkan kontestasi bahkan oleh figur yang secara genealogis bukan tokoh asli daerah. Tungga et al. (2025) dalam studi tentang modalitas anggota DPRD menunjukkan bahwa modal politik, sosial, ekonomi, budaya, dan simbolik berperan penting sebagai faktor kunci dalam menentukan hasil kontestasi politik di tingkat lokal.

Di daerah dengan tradisi patrimonialisme yang kuat seperti Sulawesi Selatan, modal simbolik berbasis keturunan dinasti memiliki kekuatan eksepsional dalam menentukan posisi elite dalam hierarki status lokal (Hadrawi, 2017; Caldwell & Bougas, 2004). Hastira dan Zahir (2025) dalam penelitian terbaru di Jeneponto tentang dinasti politik di Desa Banrimanurung, Kecamatan Bangkala Barat, menemukan bahwa keberlanjutan dinasti politik didukung empat faktor utama: legitimasi tradisional dari simbol kekaraengan, pengaruh nilai-nilai adat seperti pangndakkang, hubungan patron-klien yang menciptakan ketergantungan ekonomi, dan fleksibilitas keluarga Karaeng dalam beradaptasi dengan sistem demokrasi modern.

Praktik patronase dan klientelisme juga memainkan peran penting dalam dinamika Pilkada. Aspinall dan Sukmajati (2015) menempatkan patronase dan klientelisme sebagai pola utama politik elektoral Indonesia, sementara Pratama (2017) dalam studi Pilkada Kendari 2017 mengungkapkan bahwa relasi patronase terbentuk melalui jalinan politisi, birokrat, dan masyarakat, di mana walikota memanfaatkan aparat birokrasi untuk memenangkan anaknya, dengan patronase didistribusikan melalui jaringan klientelisme seperti tim sukses yang dikonsolidasi bersama tokoh lokal (local strongman). Siregar



(2020) menyatakan bahwa Indonesia dapat digambarkan sebagai “demokrasi patronase” dengan sistem klientelisme terfragmentasi, sementara Berenschot (2018) menegaskan bahwa pendanaan kampanye sebagian besar didorong oleh kesepakatan transaksional antara politik dan dunia bisnis.

Kasus Pilkada Jeneponto periode 2013–2024 menjadi contoh empiris yang instruktif untuk memahami dinamika ini melalui perspektif longitudinal. Jeneponto adalah daerah dengan tradisi patrimonialisme yang kuat, di mana modal simbolik berbasis keturunan dinasti, seperti status “karaeng” (pemimpin tradisional)—sangat berpengaruh dalam menentukan hierarki status elite lokal (Hadrawi, 2017; Caldwell & Bougas, 2004). Pada Pilkada 2013, pasangan Iksan Iskandar (Karaeng Ninra dari dinasti Binamu) dan Mulyadi Mustamu (keturunan Karaeng Bangkala) meraih kemenangan dengan 102.499 suara (51,04%), menunjukkan kuatnya konsolidasi modal simbolik kedua dinasti (Antaranews, 2013). Namun, menjelang Pilkada 2018, dinamika koalisi mengalami perubahan radikal yang menandai transisi dari patrimonialisme tradisional menuju model hibrida yang lebih kompleks (Tribun Makassar, 2016).

Fenomena kunci yang menjadi fokus penelitian ini adalah perpecahan koalisi Iksan–Mulyadi dan keputusan strategis mengganti Mulyadi Mustamu dengan Paris Yasir sebagai pasangan calon wakil bupati pada Pilkada 2018. Perpecahan koalisi bukan inisiatif Iksan semata, melainkan hasil perhitungan strategis Mulyadi yang memilih maju mandiri dengan mengandalkan basis Bangkala (45% penduduk Jeneponto), modal sosial yang dibangun selama lima tahun sebagai Wakil Bupati, dan modal politik melalui posisi Ketua Hanura Jeneponto (Berita Kota Makassar, 2016; Rakyat Sulsel, 2022). Namun, strategi ini gagal: pasangan Mulyadi–Kasmin hanya memperoleh 63.879 suara (30,43%), terkalahkan jauh oleh Iksan–Paris yang meraih 90.245 suara (42,98%) (KPU Jeneponto, 2018). Paris Yasir hadir dengan kombinasi modalitas yang jauh lebih lengkap: modal budaya/institusional (Wakil Ketua DPRD 2014–2018), modal sosial (jaringan lintas kecamatan), modal ekonomi (pengusaha dengan kapasitas finansial signifikan), dan modal simbolik (keturunan Karaeng Bangkala dengan persepsi “segar”). Survei pada Desember 2017 menunjukkan peningkatan elektabilitas Iksan–Paris menjadi 52,4% setelah penggantian kandidat (Terkininews, 2018).

Sintesis terhadap perkembangan literatur terkini (state of the art) memperlihatkan tiga aliran kajian yang berkembang pesat namun berjalan relatif terpisah. Pertama, kajian koalisi pragmatis yang menyoroti pergeseran orientasi partai dari policy-seeking menuju office-seeking (Ekowati, 2019; Al Hamid, 2025; Election Corner Fisipol UGM, 2025).



Kedua, kajian dinasti politik dan oligarki yang mendokumentasikan persistensi dan ekspansi kekerabatan kekuasaan pada Pilkada 2024 (ICW, 2024; IPP Atma Jaya, 2024; Kenawas, 2023; Telaumbanua, 2024). Ketiga, kajian modalitas dan kapital Bourdieu yang memetakan sumber daya kemenangan kandidat di arena lokal (Adyan et al., 2025; Tungga et al., 2025; Kamal et al., 2026).

Berdasarkan sintesis tersebut, kesenjangan penelitian (research gap) yang belum terjawab adalah minimnya studi yang melacak secara longitudinal bagaimana konfigurasi modalitas elite bertransformasi di dalam satu wilayah patrimonial lintas beberapa siklus elektoral. Sebagian besar kajian bersifat potret tunggal (single-snapshot) pada satu momen pemilihan, sehingga belum mampu menjelaskan mekanisme dinamis perpecahan, substitusi, dan regenerasi koalisi dari waktu ke waktu. Selain itu, ketiga aliran literatur di atas jarang diintegrasikan dalam satu kerangka yang sekaligus menjelaskan stabilitas, fragmentasi, dan adaptasi elite.

Menjawab kesenjangan tersebut, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analitik longitudinal yang mengintegrasikan *Unified Elite Theory*, *New Elite Theory*, dan konsep modalitas Bourdieu untuk menjelaskan restrukturisasi koalisi sepanjang tiga fase Pilkada Jeneponto (2013, 2018, 2024). Berbeda dari studi terdahulu, penelitian ini tidak sekadar mengidentifikasi modal yang dimiliki kandidat, melainkan menelusuri proses konversi dan rekombinasi modalitas yang menjelaskan mengapa dinasti dapat bertahan secara adaptif meskipun dominasi simbolik murni menurun. Dengan demikian, kontribusi penelitian bersifat teoretis sekaligus metodologis: menyediakan model pelacakan transformasi elite yang menghubungkan temuan historis dengan isu kontemporer oligarki dan dinasti politik.

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana modalitas elite local, dalam dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik, memengaruhi pembentukan, restrukturisasi, dan perpecahan koalisi dalam Pilkada melalui perspektif longitudinal 2013–2024, khususnya studi kasus dinamika koalisi di Pilkada Jeneponto. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi jenis dan kombinasi modalitas yang dimiliki aktor elite utama (Iksan Iskandar, Mulyadi Mustamu, dan Paris Yasir) dalam pembentukan koalisi periode 2013–2018; (2) menganalisis mekanisme perpecahan koalisi antara Iksan dan Mulyadi sebagai hasil kalkulasi modalitas dan viabilitas elektoral; (3) menjelaskan bagaimana keputusan penggantian kandidat berbasis optimalisasi modalitas menghasilkan peningkatan signifikan dukungan elektoral; (4) mengontekstualisasikan temuan historis dengan dinamika Pilkada 2024 untuk



menunjukkan relevansi dan persistensi pola modalitas elite; dan (5) berkontribusi pada pengembangan kerangka teoretis yang responsif terhadap konteks patrimonial lokal Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka ini mengeksplorasi tiga kerangka teoretis utama yang menjadi landasan analisis, teori koalisi politik, teori elite, dan konsep modalitas Bourdieu, serta merumuskan secara eksplisit kesenjangan teoretis (theoretical gap) yang menjadi ruang kontribusi penelitian ini.

Teori Koalisi Politik dan Dinamika Empiris di Indonesia

Teori koalisi politik berkembang melalui dua pendekatan utama sejak proposisi Riker (1962) tentang *Minimal Winning Coalition* (MWC), yang menyatakan bahwa aktor politik cenderung membentuk koalisi sekecil mungkin yang masih mencukupi untuk meraih mayoritas. Axelrod (1970) menekankan pendekatan berbasis preferensi kebijakan (*policy-based coalitions*), sementara Lijphart (1999) memberikan perspektif tentang fungsi koalisi dalam demokrasi konsensual. Namun, aplikasi teori-teori Barat ini terhadap konteks Pilkada Indonesia mengungkap keterbatasan signifikan. Al Hamid (2025) menunjukkan bahwa koalisi di Indonesia cenderung ekspansif dan berfungsi sebagai mekanisme mitigasi volatilitas politik, bukan memaksimalkan efisiensi sebagaimana diprediksi MWC. Hidayat et al. (2026) menemukan bahwa pembentukan koalisi didorong kepentingan akses kekuasaan dan sumber daya ekonomi, bukan keselarasan ideologi. Temuan ini konsisten dengan Ekowati (2019) yang mengidentifikasi pergeseran orientasi partai dari *policy-seeking* menuju *office-seeking* semata.

Keterbatasan teori koalisi konvensional di sini bersifat mendasar: kerangka MWC, *policy-based*, maupun konsosiasional mengasumsikan aktor partai yang otonom dan berorientasi kebijakan, sehingga kurang mampu menjelaskan koalisi yang dibentuk di sekitar figur dan kalkulasi modalitas personal dalam konteks patrimonial. Inilah ruang yang menuntut komplemen kerangka analitik yang lebih sensitif terhadap dinamika elite lokal.

Teori Elite: Dari Unified Elite Theory ke New Elite Theory

Untuk memahami bagaimana elite lokal beroperasi, penelitian ini merujuk pada *Unified Elite Theory* (UET) yang dikembangkan Higley dan Burton (2006), yang menegaskan bahwa stabilitas rezim demokratis bergantung pada konsensus nilai dan integrasi struktural di antara elite. Meskipun berharga dalam menjelaskan dinamika elite



tingkat nasional, UET menunjukkan keterbatasan ketika diterapkan di konteks lokal Indonesia yang patrimonial, karena elite lokal jarang membangun konsensus nilai yang kokoh dan justru terlibat dalam kompetisi fragmentatif yang intens. Oleh karena itu, *New Elite Theory* (NET) yang dikembangkan Pakulski (2012) menawarkan perspektif yang lebih relevan: elite modern tidak lagi homogen atau terkonsolidasi dalam satu blok, melainkan terfragmentasi dalam hierarki status yang dibentuk oleh kombinasi dinamis berbagai bentuk modal. Relevansi NET dalam konteks Indonesia terlihat dari studi Pinatih et al. (2022), yang menunjukkan bahwa kelangsungan elite tradisional (aristokrasi Puri) di Bali pada era pasca-reformasi dipengaruhi budaya politik elitis: elite feodal beradaptasi dengan mengonversi legitimasi kultural masa lalu menjadi kekuasaan eksekutif modern melalui arena elektoral.

Konsep Modalitas Bourdieu dan Akumulasi Kapital Elite

Untuk menganalisis sumber daya yang memungkinkan elite mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka, penelitian ini menggunakan kerangka bentuk-bentuk kapital dari Pierre Bourdieu (1986), yang mengonseptualisasikan modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik sebagai sumber daya yang dapat dikonversi untuk memperoleh posisi dan pengaruh dalam struktur sosial. Penerapan konsep ini pada Pilkada Indonesia telah menghasilkan temuan penting. Adyan et al. (2025) menganalisis dinasti politik Indonesia melalui lensa Bourdieu, menemukan bahwa modal budaya dan ekonomi berperan kritis dalam reproduksi kekuasaan dinasti. Tungga et al. (2025) menegaskan bahwa kelima bentuk modal, termasuk modal politik, berperan kunci sebagai faktor determinan hasil kontestasi politik lokal. Dalam konteks Sulawesi Selatan, Hastira dan Zahir (2025) mengungkap bahwa keberlanjutan dinasti politik di Jeneponto didukung kombinasi legitimasi tradisional berbasis simbol kekaraengan, nilai adat pangdakkang, hubungan patron-klien, dan fleksibilitas strategis keluarga.

Kesenjangan Teoretis (Theoretical Gap) dan Posisi Penelitian

Dari telaah di atas, dapat dirumuskan dua lapis kesenjangan teoretis. Pertama, keterbatasan teori sebelumnya: (a) teori koalisi konvensional (Riker, 1962; Axelrod, 1970; Lijphart, 1999) berorientasi kebijakan dan kurang menjelaskan koalisi berbasis figur dalam konteks patrimonial; (b) UET (Higley & Burton, 2006) mengandaikan konsensus nilai yang stabil, padahal integrasi elite lokal bersifat rapuh dan transaksional; dan (c) studi modalitas Bourdieu yang ada (Adyan et al., 2025; Tungga et al., 2025) umumnya bersifat statis, memotret



komposisi modal pada satu titik waktu tanpa melacak konversi dan rekombinasinya secara dinamis.

Kedua, ruang kontribusi teori baru: penelitian ini mengintegrasikan UET, NET, dan modalitas Bourdieu ke dalam satu kerangka longitudinal yang mampu menjelaskan tiga keadaan

elite sekaligus stabilitas (UET), fragmentasi (NET), dan adaptasi melalui konversi kapital silang (Bourdieu). Dengan demikian, kontribusi teoretis penelitian bukan sekadar menerapkan teori yang ada, melainkan menautkannya menjadi model bertahap yang sensitif terhadap konteks patrimonial lokal dan dapat melacak trajektori transformasi koalisi dari waktu ke waktu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif dengan fokus pada analisis data sekunder. Pemilihan desain ini didasarkan pada kebutuhan memperoleh pemahaman mendalam tentang mekanisme kompleks yang mendasari pembentukan dan restrukturisasi koalisi dalam konteks spesifik, yaitu Pilkada Jeneponto periode 2013–2024 (Yin, 2014). Studi kasus memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena dalam kondisi riilnya dan mengungkap logika di balik keputusan strategis elite lokal yang tidak dapat dipahami melalui pendekatan kuantitatif semata (Stake, 1995). Sebagai metode kualitatif, pendekatan ini menekankan interpretasi, kontekstualisasi, dan pemahaman holistik terhadap dinamika sosial-politik, bukan generalisasi statistik (Denzin & Lincoln, 2005).

Penelitian mengandalkan analisis data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen, publikasi, dan arsip publik. Pendekatan ini dipilih karena: pertama, fenomena utama telah berlalu (Pilkada 2018), sehingga tidak memungkinkan observasi langsung; kedua, data sekunder yang relevan terkumpul substansial melalui liputan media, laporan resmi, dan publikasi akademik; dan ketiga, analisis data sekunder lebih efisien dalam hal biaya, waktu, dan akses (Boslaugh, 2007).

Data dikumpulkan dari tiga sumber utama. Pertama, dokumen historis dan berita dari portal media terkemuka, yang memberikan narasi tentang dinamika koalisi selama Pilkada Jeneponto 2013, 2018, dan 2024. Kedua, tinjauan literatur akademik mencakup jurnal peer-reviewed, buku teoretis, dan karya fundamental tentang teori koalisi, teori elite, dan Pilkada lokal (Riker, 1962; Bourdieu, 1986; Higley & Burton, 2006; Pakulski, 2012). Ketiga, data elektoral dan demografis dari hasil perolehan suara Pilkada serta



survei elektabilitas lembaga survei profesional.

Analisis data menggunakan dua pendekatan: *thematic content analysis* dan *critical narrative analysis* (Braun & Clarke, 2006; Czarniawska, 2004). Data dikodekan dan dikategorikan berdasarkan tema kunci: jenis modalitas elite, mekanisme pembentukan koalisi, dan faktor perpecahan koalisi. Selanjutnya, data disusun dalam narasi kronologis yang melacak perjalanan koalisi dari 2013 hingga 2024. Analisis kemudian menerapkan UET, NET, dan teori modal

Bourdieu untuk memahami bagaimana berbagai bentuk modalitas memengaruhi pembentukan, restrukturisasi, dan hasil koalisi. Hasil dari berbagai tahap disintesis untuk memberikan pemahaman menyeluruh yang menjawab pertanyaan penelitian secara terintegrasi (Miles & Huberman, 1994; Ryan & Bernard, 2000).

Kedalaman ilmiah dipertahankan melalui triangulasi sumber data (media, akademik, elektoral) dan transparansi metodologis dalam proses pengodean dan kategorisasi data (Lincoln & Guba, 1985). Penelitian mengintegrasikan perspektif longitudinal yang memungkinkan pelacakan transformasi dinamika koalisi dari 2013 hingga 2024, menghubungkan temuan historis dengan isu kontemporer oligarki dan dinasti politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis restrukturisasi koalisi Pilkada Jeneponto 2013–2024 melalui lensa modalitas elite, ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Kerangka analitik mengintegrasikan UET, NET, dan konsep modal Bourdieu untuk mengalihkan fokus dari sekadar perhitungan suara menuju bagaimana elite mengakumulasi dan mengonversi berbagai bentuk modal untuk mempertahankan kekuasaan (Adyan et al., 2025). Pola transformasi modalitas ini dianalisis melalui tiga fase: dominasi simbolik (2013), transisi material (2018), hingga regenerasi dinasti (2024).

Konfigurasi Modalitas Elite dan Kemenangan Koalisi 2013: Patrimonialisme Tradisional

Kemenangan pasangan Iksan Iskandar–Mulyadi Mustamu pada Pilkada Jeneponto 2013 dengan 102.499 suara (51,04%) merepresentasikan puncak konsolidasi modal simbolik dinasti lokal (AntaraneWS, 2013; KPU Jeneponto, 2013). Iksan Iskandar sebagai Karaeng Ninra dari dinasti Binamu dan Mulyadi Mustamu sebagai keturunan Karaeng Bangkala merepresentasikan penyatuan dua garis kekaraengan utama di Jeneponto, menciptakan legitimasi genealogis yang nyaris total di mata pemilih (Hadrawi, 2017).



Pada 2013, dinamika modal dalam arena elektoral Jeneponto belum sepenuhnya terkomodifikasi. Modal ekonomi dan sosial relatif seimbang di antara kandidat potensial; yang membedakan secara fundamental adalah akses terhadap modal simbolik berbasis status karaeng. Kerangka Bourdieu mengungkapkan bahwa dalam masyarakat dengan tradisi patrimonial yang kuat, modal simbolik, warisan status dan legitimasi genealogis, memiliki daya konversi elektoral paling efektif tanpa memerlukan investasi sumber daya ekonomi yang besar (Bourdieu, 1986; Adyan et al., 2025). Status karaeng langsung dapat diterjemahkan menjadi dukungan pemilih tanpa kampanye mahal, karena pemilih menilai kualifikasi calon berdasarkan silsilah keluarga, sejarah kepemimpinan keluarga, dan penghormatan terhadap tradisi (Caldwell & Bougas, 2004; Hadrawi, 2017). Kombinasi Iksan–Mulyadi menciptakan “efek hegemoni ganda”: kedua dinasti secara bersamaan menutup peluang bagi calon lain untuk menggunakan strategi modal simbolik serupa, karena pasokan garis kekaraengan yang sah sangat terbatas.

Dari sudut pandang teori, pada 2013 *Unified Elite Theory* (UET) menjelaskan stabilitas politik lokal melalui konsensus tak tertulis antara dinasti Binamu dan Bangkala mengenai pembagian kekuasaan dan akses terhadap sumber daya daerah (Higley & Burton, 2006). Integrasi struktural ini terwujud dalam koalisi vertical, calon bupati dari dinasti Binamu, calon wakil bupati dari dinasti Bangkala, yang memungkinkan reproduksi kekuasaan elite tanpa konflik berarti. Namun, UET menunjukkan keterbatasannya: konsensus elite tidak didasarkan pada kesepakatan nilai yang tetap, melainkan kompromi pragmatis mengenai pembagian kekuasaan dan distribusi keuntungan material, sehingga integrasi ini rapuh dan sangat rentan terhadap perubahan perhitungan individu terkait kelayakan elektoral.

Dinamika Modalitas dan Perpecahan Koalisi 2018: Erosi Modal Simbolik

Menjelang Pilkada 2018, pola koalisi yang stabil pada 2013 mengalami reinterpretasi fundamental oleh Mulyadi Mustamu. Keputusan Mulyadi keluar dari koalisi dan maju sebagai penantang mandiri bukan sekadar akibat konflik personal, melainkan hasil perhitungan strategis sistematis atas viabilitas elektoral berdasarkan akumulasi modal selama lima tahun menjabat Wakil Bupati (Rakyat Sulsel, 2022; Tribun Makassar, 2016). Mulyadi mempertahankan basis demografis-simbolik Bangkala (sekitar 45% populasi Jeneponto), mengakumulasi modal sosial melalui lima tahun interaksi dalam struktur pemerintahan, dan memegang posisi institusional sebagai Ketua Hanura Jeneponto (Berita Kota Makassar, 2016).



Perhitungan Mulyadi sederhana namun strategis: kombinasi modal demografis (basis Bangkala 45%), modal sosial (lima tahun pengalaman Wakil Bupati), dan modal institusional (Ketua Hanura) dianggap cukup untuk bersaing mandiri tanpa bergantung pada modal simbolik karaeng Binamu milik Iksan. Namun, kalkulasi ini tidak terbukti valid pada taraf elektoral. Pasangan Mulyadi–Kasmin hanya memperoleh 63.879 suara (30,43%), tertinggal signifikan dari Iksan–Paris yang meraih 90.245 suara (42,98%) (KPU Jeneponto, 2018). Fenomena ini

mengonfirmasi hipotesis bahwa dalam konteks patrimonial Jeneponto, modal simbolik genealogis masih memiliki gravitasi elektoral yang jauh lebih kuat dibandingkan modal sosial-institusional yang bersifat personal dan kontingen.

Tabel 1. Konfigurasi Modalitas Elite Utama 2013–2018

Dimensi Modal	Iksan Iskandar	Mulyadi Mustamu	Paris Yasir (Calon 2018)
Modal Ekonomi	Akses inkumben (implisit)	Tidak dominan eksplisit	Pengusaha, kapasitas finansial signifikan
Modal Sosial	Jaringan birokrasi 2013	Basis Bangkala (45% penduduk)	Jaringan lintas kecamatan luas
Modal Budaya/Institusional	Bupati inkumben	Wakil Bupati; Ketua Hanura	Wakil Ketua DPRD 2014–2018
Modal Simbolik	Karaeng Ninra, dinasti Binamu	Keturunan Karaeng Bangkala	Keturunan Karaeng Bangkala (citra “segar”)

Sumber: Diolah penulis dari data sekunder (2025).

Dari perspektif teoretis, perpecahan koalisi 2018 merefleksikan transisi dari UET menuju *New Elite Theory* (NET). Elite lokal Indonesia tidak lagi terkonsolidasi dalam blok monolitik yang stabil; sebaliknya, mereka terfragmentasi dalam kompetisi intens atas hierarki status yang dibentuk kombinasi dinamis berbagai bentuk modal. Mulyadi menghitung akumulasi modal sosial-institusionalnya cukup untuk berdiri mandiri, tetapi realitas pemilih menunjukkan modal simbolik dinasti tetap mengalahkan kombinasi modal sosial dan institusional ketika tidak didukung modal ekonomi yang



kuat dan jaringan kampanye yang canggih.

Restrukturisasi Koalisi 2018: Optimalisasi Konversi Modal

Keputusan Iksan Iskandar mengganti Mulyadi Mustamu dengan Paris Yasir sebagai pasangan wakil bupati pada Pilkada 2018 mencerminkan optimalisasi strategi dan respons terhadap perubahan lanskap elektoral (Rakyat Sulsel, 2022; Tribun Makassar, 2016). Iksan melakukan penyesuaian rasional dengan mengganti posisi wakil bupati yang sebelumnya dijabat elite tradisional (Mulyadi dari dinasti Bangkala) dengan sosok yang membawa kombinasi modal yang lebih lengkap dan terdiversifikasi.

Paris Yasir membawa paket modalitas yang jauh lebih kompleks: modal budaya/institusional sebagai Wakil Ketua DPRD Jeneponto 2014–2018; modal sosial melalui jaringan lintas-kecamatan yang mengintegrasikan berbagai strata dan komunitas di luar basis tradisional Bangkala; modal ekonomi signifikan sebagai pengusaha yang memungkinkan mobilisasi sumber

daya kampanye modern dan distribusi benefit material kepada jaringan klientelistik (PPID Kabupaten Jeneponto, 2025); serta modal simbolik sebagai keturunan Karaeng Bangkala dengan positioning “segar”, dipersepsikan sebagai elite muda progresif yang tidak semata mengandalkan warisan genealogis tetapi juga kapabilitas personal (Detik.com, 2024).

Dampak perubahan koalisi ini terlihat jelas melalui survei elektabilitas. Survei pada Juni 2018 menunjukkan elektabilitas Iksan–Paris naik menjadi 52,4% setelah penggantian kandidat, dibandingkan 49,3% sebelumnya (Sindonews, 2018). Dengan bergabungnya Paris Yasir yang membawa kombinasi modal ekonomi, sosial, institusional, dan simbolik, pasangan Iksan berhasil menarik segmen pemilih yang tidak hanya terpengaruh modal simbolik dinasti, tetapi juga kombinasi modal yang lebih nyata dan berbasis kredibilitas kinerja.

Kerangka Bourdieu menjelaskan fenomena ini melalui konsep konversi kapital silang. Paris Yasir mendemonstrasikan bahwa modal ekonomi dapat dikonversi menjadi modal sosial melalui jaringan relasi yang dibangun dari aktivitas usaha dan distribusi sumber daya, yang kemudian dikonversi menjadi modal simbolik kontekstual melalui positioning sebagai pemimpin kredibel dan modern (Bourdieu, 1986; Adyan et al., 2025). Peningkatan elektabilitas Iksan–Paris mengonfirmasi bahwa integrasi modal yang lebih seimbang memberikan keunggulan elektoral superior dibandingkan model koalisi dinasti tradisional yang mengandalkan modal simbolik murni.



Pola Longitudinal 2013–2024: Transformasi dari Patrimonialisme menuju Oligarki Adaptif

Menganalisis tiga fase Pilkada Jeneponto (2013, 2018, 2024) menunjukkan perjalanan transformasi yang konsisten dalam konfigurasi kekuatan elite lokal, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Transformasi Modalitas Elite dan Perolehan Suara 2013–2024

Fase	Tahun	Aktor Utama	Basis Modal Dominan	Perolehan Suara	Karakterisasi
Patrimonialisme	2013	Iksan–Mulyadi	Modal simbolik dinasti	102.499	Konsolidasi
Tradisional			(karaeng)	(51,04%)	dinasti; legitimasi genealogis dominan
Transisi & Fragmentasi	2018	Iksan–Paris vs. Mulyadi–Kasmin	Kombinasi ekonomi + simbolik vs. sosial-demografis	90.245 vs. 63.879 (42,98% vs. 30,43%)	Fragmentasi elite; kompetisi modalitas
Regenerasi Dinasti	2024	Paris–Islam Iskandar	Modal ekonomi (Paris) + simbolik generasi-2 (Islam)	89.147 (42,07%)	Regenerasi generasional; hegemoni adaptif

Sumber: Diolah penulis dari data KPU Jeneponto (2013; 2018; 2024).

Pola yang terlihat menunjukkan bukan penurunan linear dalam dominasi dinasti, melainkan perubahan cara kerja oligarki lokal. Pada 2013, dinasti menang dengan margin cukup besar menggunakan modal simbolik murni (51,04%). Pada 2018, meskipun perolehan suara nominal menurun, pemenang tetap dari garis keturunan dinasti (Paris) dengan kombinasi modal yang lebih kompleks (42,98%), dan elektabilitas survei meningkat menjadi 52,4%. Pada 2024, pasangan Paris–Islam tetap menang dengan margin yang lebih kecil (42,07%), merupakan kemenangan dengan margin terendah dalam sejarah pemilihan langsung Jeneponto. Penurunan 51,04% → 42,98% → 42,07%



tidak menunjukkan hilangnya dominasi dinasti, tetapi mencerminkan meningkatnya kompetisi elektoral dan kemampuan dinasti beradaptasi dengan mengombinasikan berbagai bentuk modal.

Fenomena 2024: Regenerasi Dinasti dan Hegemoni Adaptif

Pilkada Jeneponto 2024 merepresentasikan fase baru transformasi koalisi elite: regenerasi dinasti melalui transfer kekuasaan generasional yang terstruktur. Pasangan pemenang Paris Yasir–Muhammad Islam Iskandar menggabungkan dua strategi yang saling melengkapi untuk mempertahankan kontrol hegemoni dalam konteks kompetisi yang semakin ketat (Detik.com, 2024; KPU Jeneponto, 2024).

Tabel 3. Perolehan Suara Pilkada Jeneponto 2024 (Hasil KPU)

Pasangan	Suara Sah	Persentase	Status	Margin
Paris Yasir–Islam Iskandar	89.147	42,07%	Pemenang	–
Muhammad Sarif–M. Noer Alim Qalby	88.083	41,57%	Pesaing Ketat	1.064 (0,5%)
Syamsuddin Karlos– Syafuruddin Nurdin	27.543	13,00%	Pesaing Ketiga	–
Efendi Al-Qadri–Andry Suryana	7.141	3,37%	Pesaing Keempat	–

Sumber: KPU Kabupaten Jeneponto (2024).

Paris Yasir, Wakil Bupati petahana (2018–2024), telah mengonsolidasikan modal ekonomi, sosial, dan institusional selama enam tahun. Sebagai pengusaha, ia memiliki kapasitas finansial untuk mendukung kampanye modern dan membangun jaringan klientelistik yang luas. Keputusan Paris mencalonkan diri sebagai calon utama pada 2024 mencerminkan perkembangan alami karier politiknya, perpindahan dari posisi wakil menuju posisi puncak (Demokratis, 2025; PPID Kabupaten Jeneponto, 2025).

Muhammad Islam Iskandar, keponakan Bupati Iksan Iskandar (2013–2023), menjabat Ketua Komisi I DPRD Jeneponto 2019–2024. Sebagai generasi kedua dinasti Binamu, ia membawa kombinasi modal yang unik: modal simbolik dari garis keturunan keluarga Iksan (karaeng) yang memberikan kontinuitas legitimasi dinasti; modal institusional sebagai Ketua Komisi di legislatif; serta modal sosial yang diwarisi dari



keluarga Iksan ditambah jaringan personal yang dibangun melalui aktivitas legislatif (Rakyat Sulsel, 2024).

Pemilihan Islam Iskandar sebagai wakil bupati bukan keputusan kebetulan, melainkan strategi yang disengaja untuk memperpanjang kekuasaan dinasti Binamu melalui transfer kekuasaan antar-generasi yang terstruktur. Dengan menempatkan Islam Iskandar sebagai wakil bupati di bawah kepemimpinan Paris (yang berasal dari luar dinasti), dinasti Binamu memastikan bahwa meskipun bupati dijabat figur non-dinasti, kontrol terhadap modal simbolik, jaringan patron-klien, dan ritual tradisional tetap berada di tangan mereka. Strategi ini menunjukkan kecanggihan adaptasi oligarki: bukan sekadar mempertahankan monopoli mutlak atas posisi bupati, tetapi mempertahankan kontrol atas struktur kekuasaan dengan menempatkan anggota dinasti di posisi subordinat namun strategis.

Margin kemenangan yang hanya 1.064 suara (0,5%) mencerminkan kompetisi paling ketat dalam sejarah Pilkada Jeneponto sejak pemilihan langsung dimulai pada 2005 (KPU Jeneponto, 2024). Angka ini menunjukkan fragmentasi yang jelas dalam basis pemilih, tidak ada lagi blok pemilih yang solid hanya mengandalkan modal simbolik dinasti. Kemenangan Paris–Islam sangat dipengaruhi koalisi multi-partai (NasDem, Golkar, Perindo, PSI, dan PKN) yang menunjukkan penetrasi jaringan klientelistik yang luas (Rakyat Sulsel, 2024). Pesaing utama, Muhammad Sarif–

Moch. Noer Alim Qalby, menawarkan alternatif elite yang kuat dengan modal institusional sebanding, dengan Sarif sebagai mantan birokrat berpengalaman yang memiliki kredibilitas administratif (Rakyat Sulsel, 2024).

Interpretasi Teoretis: Modalitas Elite dan Mekanisme Persistensi Oligarki

Analisis terhadap tiga fase Pilkada Jeneponto menunjukkan bahwa perubahan koalisi lokal tidak didorong logika ideologis atau programatik, melainkan perubahan konfigurasi kekuatan elite. Pada 2013, UET menjelaskan stabilitas melalui konsensus tak tertulis antara dinasti Binamu dan Bangkala, namun konsensus ini rapuh karena berbasis kompromi transaksional. Pada 2018, perpecahan koalisi dan kekalahan Mulyadi–Kasmin membuktikan tesis NET bahwa elite lokal terfragmentasi dan bersaing dalam hierarki status yang dipengaruhi kombinasi berbagai bentuk modal (Pakulski, 2012): Mulyadi kalah bukan karena kurang dikenal, melainkan karena kalkulasi modalitasnya tidak seimbang. Pada 2024, kemenangan Paris–Islam dengan margin sangat tipis mengungkap cara oligarki bertahan melalui konversi kapital silang, modal ekonomi Paris dikonversi



menjadi modal sosial-klientelistik, sementara modal simbolik genealogis Islam diperkuat melalui penempatannya sebagai penerus dinasti (Bourdieu, 1986; Adyan et al., 2025).

Diskusi Komparatif dengan Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian ini perlu didialogkan dengan studi terdahulu untuk menegaskan posisi dan kontribusinya. Pertama, dibandingkan dengan kajian koalisi pragmatis di tingkat nasional dan provinsi (Al Hamid, 2025; Hidayat et al., 2026; Election Corner Fisipol UGM, 2025), kasus Jeneponto memperlihatkan kesamaan sekaligus perbedaan penting. Kesamaannya, koalisi sama-sama dibentuk atas dasar kalkulasi elektoral dan akses sumber daya, bukan ideologi. Perbedaannya, jika studi-studi tersebut umumnya menyoroti dominasi koalisi besar yang menutup kompetisi (uncontested), Jeneponto 2024 justru memperlihatkan kompetisi paling ketat sepanjang sejarahnya (margin 0,5%). Hal ini menunjukkan bahwa pragmatisme koalisi tidak selalu menghasilkan ketertutupan kompetisi; dalam konteks fragmentasi modal yang merata antar-elite, koalisi besar tetap dapat menghadapi penantang yang kompetitif.

Kedua, dibandingkan dengan kajian dinasti politik (Kenawas, 2023; Kenawas, 2023; Telaumbanua, 2024; IPP Atma Jaya, 2024), penelitian ini memperdalam pemahaman tentang mekanisme persistensi dinasti. Jika literatur tersebut umumnya menekankan reproduksi dinasti secara vertikal (orang tua–anak) dan peran celah hukum, temuan Jeneponto menambahkan

mekanisme regenerasi horizontal dan koalitif: dinasti Binamu bertahan dengan menempatkan keponakan (Islam Iskandar) sebagai wakil dari figur non-dinasti (Paris Yasir), bukan melalui pewarisan langsung kursi bupati. Pola ini memperkaya tipologi dinasti dengan kategori “dinasti adaptif-koalitif” yang belum banyak dibahas.

Ketiga, dibandingkan dengan kajian modalitas Bourdieu di daerah lain (Kamal et al., 2026 di Sulawesi Tenggara; Adyan et al., 2025 pada level nasional; Haboddin, 2020 di Bantaeng), penelitian ini mengonfirmasi temuan umum bahwa kemenangan ditentukan kombinasi, bukan dominasi tunggal, berbagai modal. Studi Kamal et al. (2026) menunjukkan figur non-genealogis dapat menang melalui konversi modal politik; temuan Jeneponto melengkapi gambaran ini dengan memperlihatkan sisi sebaliknya, yaitu bagaimana dinasti genealogis justru *mengadopsi* logika konversi modal material untuk mempertahankan diri. Konsistensi lintas-kasus ini, Bantaeng, Sulawesi Tenggara, dan Jeneponto, memperkuat validitas eksternal argumen bahwa di Sulawesi, modal simbolik tradisional kini berfungsi sebagai syarat perlu namun tidak lagi memadai tanpa



kombinasi modal ekonomi dan jaringan.

Keempat, terhadap kajian patronase dan klientelisme (Aspinall & Sukmajati, 2015; Berenschot, 2018; Pratama, 2017), penelitian ini memberikan ilustrasi longitudinal tentang bagaimana jaringan klientelistik bergeser dari berbasis kekerabatan-genealogis (2013) menuju berbasis koalisi multi-partai dan distribusi sumber daya material (2024). Dengan demikian, kontribusi distingtif penelitian terletak pada penyatuan ketiga perspektif, koalisi, elite, dan modalitas, dalam satu narasi transformasi yang tidak ditawarkan studi-studi sebelumnya secara terpisah.

Kontekstualisasi Nasional: Dinasti dan Oligarki dalam Pilkada 2024

Temuan di Jeneponto menjadi signifikan secara nasional ketika dibandingkan dengan data Pilkada 2024. ICW (2024) melaporkan bahwa 26,6% dari 582 kandidat terafiliasi dinasti, sementara Institute for Public Policy (IPP) Atma Jaya (2024) mencatat lonjakan hingga 605 figur politisi dinasti yang bertarung di berbagai level pemilihan pada 2024. Kenawas (2023) mencatat praktik dinasti meningkat tiga kali lipat antara 2010 hingga 2018, dan Telaumbanua (2024) mengonfirmasi dampak negatifnya bagi partisipasi, pluralisme, dan keadilan distribusi kekuasaan. Namun, temuan Jeneponto menunjukkan evolusi mekanistik: bukan sekadar pewarisan vertikal, tetapi regenerasi horizontal dan transfer kekuasaan terstruktur. Dinasti Binamu bertahan bukan hanya karena status genealogis, tetapi karena kemampuannya mengonversi berbagai bentuk modal secara fleksibel dan mengintegrasikan sosok non-dinasti (Paris Yasir) sebagai figur utama sambil mempertahankan kontrol melalui wakil dinasti (Islam Iskandar).

Pola ini konsisten dengan temuan Haboddin (2020) tentang perputaran elite di Bantaeng, kabupaten tetangga, yang menunjukkan keberhasilan elite bergantung pada kemampuan mengintegrasikan berbagai bentuk modal, bukan hanya status genealogis. Penelitian Hastira dan Zahir (2025) di Jeneponto juga mengungkap bahwa kelangsungan dinasti didorong legitimasi tradisional kekaraengan, nilai adat pangndakkang, hubungan patron-klien, dan fleksibilitas adaptif keluarga Karaeng. Temuan ini mengonfirmasi bahwa dinasti di Jeneponto telah bertransformasi dari patrimonialisme murni menjadi formasi hibrida yang menggabungkan modal material, jaringan klientelistik, dan legitimasi tradisional.

Implikasi teoretis dari pola ini adalah bahwa NET dan konsep modalitas Bourdieu lebih efektif memahami dinamika elite lokal Indonesia dibandingkan teori koalisi



konvensional, terutama dalam konteks patrimonial Sulawesi Selatan. Implikasi praktisnya, reformasi elektoral semestinya berfokus pada struktur distribusi modal ekonomi dan sosial, bukan hanya aturan prosedural; tanpa perubahan pada struktur kekuasaan lokal, kekuasaan dinasti akan terus berkembang dengan cara yang semakin canggih dan adaptif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa restrukturisasi koalisi Pilkada Jeneponto 2013–2024 tidak dipicu perbedaan ideologis, melainkan transformasi cara elite mengelola dan menggabungkan berbagai sumber kekuasaan (modalitas). Temuan utama menunjukkan tiga pola perubahan sistematis. Pertama, pada Pilkada 2013, kemenangan Iksan–Mulyadi didominasi modalitas simbolik (status kekaraengan) yang memberikan legitimasi langsung tanpa memerlukan investasi sumber daya besar; namun dominasi ini rapuh dan sementara. Kedua, perpecahan koalisi pada 2018 terjadi karena Mulyadi Mustamu salah menghitung kemampuannya bersaing mandiri: meski memiliki basis demografis Bangkala (45% penduduk) dan modal sosial-institusional, ia gagal karena tidak memiliki modalitas ekonomi dan simbolik yang cukup kuat untuk mengimbangi kekuatan dinasti, sedangkan restrukturisasi dengan Paris Yasir, yang membawa kombinasi modal ekonomi, sosial, budaya/institusional, dan simbolik, berhasil meningkatkan elektabilitas secara

signifikan. Ketiga, Pilkada 2024 memperlihatkan strategi adaptif dinasti melalui regenerasi generasional: pasangan Paris Yasir (non-dinasti dengan modal ekonomi kuat) dan Islam Iskandar (keponakan Iksan dengan modal simbolik dinasti) memenangkan pemilihan dengan margin tipis (1.064 suara), membuktikan bahwa dinasti tidak lagi mengandalkan modal simbolik murni, melainkan mengintegrasikan berbagai modalitas untuk bertahan dalam kompetisi yang semakin ketat.

Secara teoretis, penelitian ini mengonfirmasi bahwa kombinasi *Unified Elite Theory*, *New Elite Theory*, dan konsep modal Bourdieu lebih efektif menjelaskan dinamika lokal Indonesia dibandingkan teori koalisi konvensional. Kerangka longitudinal ini mampu menangkap kompleksitas transformasi dari patrimonialisme tradisional menuju oligarki adaptif yang mengandalkan konversi silang antar-modalitas, sebuah kontribusi yang menjawab kesenjangan studi terdahulu yang umumnya bersifat potret tunggal.

Bagi peneliti berikutnya, disarankan melakukan pemetaan struktur distribusi kapital lokal (ekonomi, sosial, budaya) di berbagai wilayah patrimonial lain untuk



memahami basis kekuatan dinasti secara komprehensif, bukan sekadar fokus pada aturan formal pencalonan. Studi komparatif lintas-kabupaten dengan desain longitudinal serupa akan memperkuat validitas eksternal model yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Bagi pembuat kebijakan, reformasi elektoral harus melampaui pendekatan prosedural. Regulasi perlu menyentuh struktur distribusi ekonomi dan sumber daya yang menopang oligarki, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan modalitas politik untuk memitigasi praktik patronase dan klientelisme yang terfragmentasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyan, Y., Anas, M., & Haboddin, M. (2025). Praktek kapital Pierre Bourdieu dalam dinasti politik kepala desa Bulbul, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(3), 1867–1874. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i3.1416>
- al Hamid, R. (2025). Indonesia's political shifts: From opposition to coalition in 2014–2024 elections. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 19(1), 121–135. <https://doi.org/10.35879/jik.v19i1.620>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Research Centre for Politics and Government (PolGov).
- Axelrod, R. (1970). *Conflict of interest: A theory of divergent goals with applications to politics*. Markham Publishing.
- Berenschot, W. (2018). The political economy of clientelism: A comparative study of Indonesia's patronage democracy. *Comparative Political Studies*, 51(12), 1563–1593. <https://doi.org/10.1177/0010414018758756>
- Boslaugh, S. (2007). *Secondary data sources for public health: A practical guide*. Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Caldwell, I., & Bougas, W. A. (2004). The early history of Binamu and Bangkala, South



- Sulawesi. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 160(4), 456–510.
<https://doi.org/10.1163/22134379-90003716>
- Czarniawska, B. (2004). *Narratives in social science research*. SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). *The SAGE handbook of qualitative research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme politik: Antara koalisi, pencalonan, dan calon tunggal dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, 5(1), 16–37.
<https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.2>
- Haboddin, M. (2020). Sirkulasi elite lokal di Bantaeng. *Jurnal Transformative*, 6(1), 72–90.
<https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.01.4>
- Hadrawi, M. (2017). Bangkala dan Binamu: Suatu kajian naskah Lontara' dalam sosial-politik Jeneponto kuno. *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, 2(2), 116–133.
<https://doi.org/10.31947/etnosia.v2i2.2750>
- Hasibuan, R. Y., Simangunsong, M., May, B., Anatasia, D. U., Ginting, L. M. B., Bintang, D. P., & Prayetno. (2023). Dinasti politik dalam pemilu: Antara partisipasi warga negara dan politik transaksional. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies (IJOMSS)*, 1(3), 8–12.
- Hastira, M. F., & Zahir, M. Z. A. K. (2025). Kekuasaan dalam tradisi: Kajian dinasti politik di Desa Banrimanurung, Kabupaten Jeneponto. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 17(2), 105–115.
- Hidayat, P., Aulia, Y., Zetra, A., & Zulfadli, Z. (2026). Koalisi partai politik dalam mengusung calon tunggal di Kabupaten Dharmasraya tahun 2024. *Jurnal Studi Ilmu Politik*, 5(1), 18–27. <https://doi.org/10.19109/jsipol.v5i1.32532>
- Higley, J., & Burton, M. (2006). *Elite foundations of liberal democracy*. Rowman & Littlefield.
- Hopkin, J. (2003). Political parties, corruption, and reform. In M. Bull & J. Newell (Eds.), *Corruption in contemporary politics* (pp. 35–49). Palgrave Macmillan.
- Jaya, I. for P. P. (IPP) A. (2024). *Melonjak drastis, 605 politisi dinasti mengikuti Pilkada serentak 2024*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
<https://ipp.atmajaya.ac.id/melonjak-drastis-605-politisi-dinasti-mengikuti-pilkada-serentak-2024/>



- Kamal, M. R., Yunus, A., Nadir, S., & Saputra, I. D. (2026). Strategi modal politik Bourdieu dalam kemenangan Andi Sumangerukka pada Pilkada Sulawesi Tenggara 2024. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2).
- Kenawas, Y. C. (2023). The irony of Indonesia's democracy: The rise of dynastic politics in the post-Suharto era. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(3), 748–764. <https://doi.org/10.1177/20578911231195970>
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries*. Yale University Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- M, E. C. F. U. G. (2025). *Peta koalisi pemenang Pilkada serentak 2024 di Indonesia*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Miranti, M., & Suryani, S. (2023). Modalitas Jariah, S.Pd. dalam memenangkan Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2022. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 5(2), 32–42. <https://doi.org/10.31958/jppd.v5i2.10255>
- Pakulski, J. (2012). The weakness of new elite theory. *Historical Social Research*, 37(1), 320–338.
- Pakulski, J., & Waters, M. (1996). *The death of class*. SAGE Publications.
- Pinatih, I. G. A. A. D. S., Marijan, K., & Wirawan, I. B. (2022). Local politics aristocracy of Bali in the post-reform era. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 7(1), 26–34. <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.36688>
- Pratama, R. A. (2017). Patronase dan klientelisme pada Pilkada serentak Kota Kendari tahun 2017. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 2(1), 33–45. <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i1.11400>
- Prianto, A. L., & Yusraini, N. (2024). How local democratic backsliding? Single candidate, pragmatism and uncompetitive local head election in Indonesia. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 9(2), 177–186. <https://doi.org/10.24198/jwp.v9i2.53451>
- Riker, W. H. (1962). *The theory of political coalitions*. Yale University Press.
- Ryan, G. W., & Bernard, H. R. (2000). Data management and analysis methods. In N. K.



Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (2nd ed., pp. 769–802). SAGE Publications.

Sapdiani, R., & Pratama, A. (2025). Politik tanpa pilihan: Pragmatisme partai politik dalam fenomena kemunculan kolom kosong pada Pilkada Kota Samarinda 2024. *Jurnal Politik Profetik*, 13(1).

Sari, N., Ferdian, K. J., & Noorikhshan, F. F. (2025). Patronase dan klientelisme dalam politik elektoral lokal. *Journal of Political Issues*, 7(1), 71–86.

Siregar, S. N. (2020). Patronage democracy in Indonesia: A review. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(1), 117–122.

Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. SAGE Publications.

Telaumbanua, R. (2024). Dinasti politik dan kualitas demokrasi di pemerintahan daerah Indonesia: Evaluasi dan perspektif. *Journal of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, 9(2), 55–67.

Tungga, F. T., Londa, V. Y., & Kumaat, R. M. (2025). Modalitas anggota DPRD dalam kontestasi politik: Studi kasus kemenangan Yermias Y. K. Pellokila pada Pemilu Legislatif 2024 di Dapil II Kabupaten Kupang. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(1), 168–180. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.852>

Watch, I. C. (2024). *Jelang pemungutan suara Pilkada 2024: Hampir seluruh provinsi di Indonesia terafiliasi dinasti politik*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/jelang-pemungutan-suara-pilkada-2024-hampir-seluruh-provinsi-di-indonesia-terafiliasi-dinasti>

Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). SAGE Publications.

Sumber Berita dan Data Resmi

Antaranews. (2013, September 18). Pasangan Iksan–Mulyadi unggul Pilkada Jeneponto. Antara Makassar. <https://makassar.antaranews.com/berita/49679>

Berita Kota Makassar. (2016). Dinamika koalisi Jeneponto menjelang Pilkada 2018. Demokratis. (2025). Profil dan karier politik Paris Yasir.

Detik.com. (2024, Desember 7). Paris Yasir–Islam Iskandar pemenang Pilkada Jeneponto 2024. detiksulsel. <https://www.detik.com/sulsel/pilkada/d-7676436>



- Indonesia Corruption Watch. (2024). Jelang pemungutan suara Pilkada 2024: Hampir seluruh provinsi di Indonesia terafiliasi dinasti politik. <https://antikorupsi.org/id/jelang-pemungutan-suara-pilkada-2024-hampir-seluruh-provinsi-di-indonesia-terafiliasi-dinasti>
- Institute for Public Policy (IPP) Atma Jaya. (2024). Melonjak drastis, 605 politisi dinasti mengikuti Pilkada serentak 2024. <https://ipp.atmajaya.ac.id/melonjak-drastis-605-politisi-dinasti-mengikuti-pilkada-serentak-2024/>
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto. (2013). Hasil penghitungan suara Pilkada Jeneponto 2013.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto. (2018). Hasil penghitungan suara Pilkada Jeneponto 2018.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto. (2024). Hasil penghitungan suara Pilkada Jeneponto 2024.
- Pusat Informasi dan Pelayanan Publik (PPID) Kabupaten Jeneponto. (2025). Profil Bupati H. Paris Yasir, S.E., M.M. <https://ppid.jenepontokab.go.id/bupati/>
- Rakyat Sulsel. (2022, November 1). Tatap Pilkada 2024, Mulyadi Mustamu incar Ketua Demokrat Jeneponto. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/11/01/>
- Rakyat Sulsel. (2024, Oktober 23). Pilkada Jeneponto 2024: Paris–Islam bersaing ketat dengan Sarif–Qalby. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/10/24/>
- Sindonews. (2018, Juni 19). Riset IPI: Petahana berpeluang besar di Pilkada Jeneponto. <https://daerah.sindonews.com/artikel/makassar/10185>
- Terkininews. (2018). Survei elektabilitas Iksan–Paris meningkat menjadi 52,4%. Tribun Makassar. (2016). Dinamika koalisi Jeneponto menjelang Pilkada 2018.

